

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026



KECAMATAN NGUSIKAN
KABUPATEN JOMBANG

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Ngusikan merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal

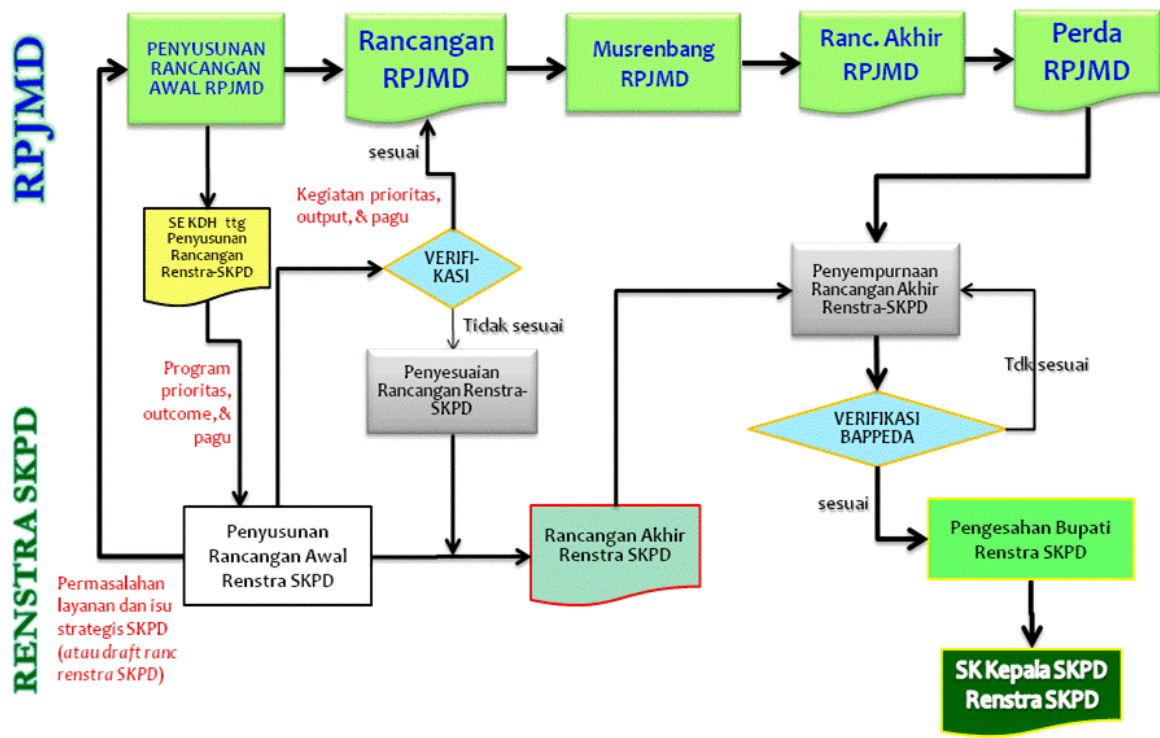
Rencana Strategis OPD Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RPD Jawa Timur Tahun 2024-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041. Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2024, Renja tahun 2025 dan Renja tahun 2026.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngusikan disusun dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.115.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra SKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.115.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mendasari adanya program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra 2024-2026.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak

langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Kecamatan Ngusikan Tahun 2024- 2026 disusun dengan mendasar kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor 47, Penjelasan Tentang Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan encana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Permendagri No. 90/2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
17. Permendagri No 73/ 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.;

18. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/D);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua ata Peraturan Bupati Jombang nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/D);
25. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi

pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Renstra Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Ngusikan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Ngusikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Ngusikan.
4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Ngusikan dalam memahami arah kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok sasaran layanan
- 2.5. Mitra Perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

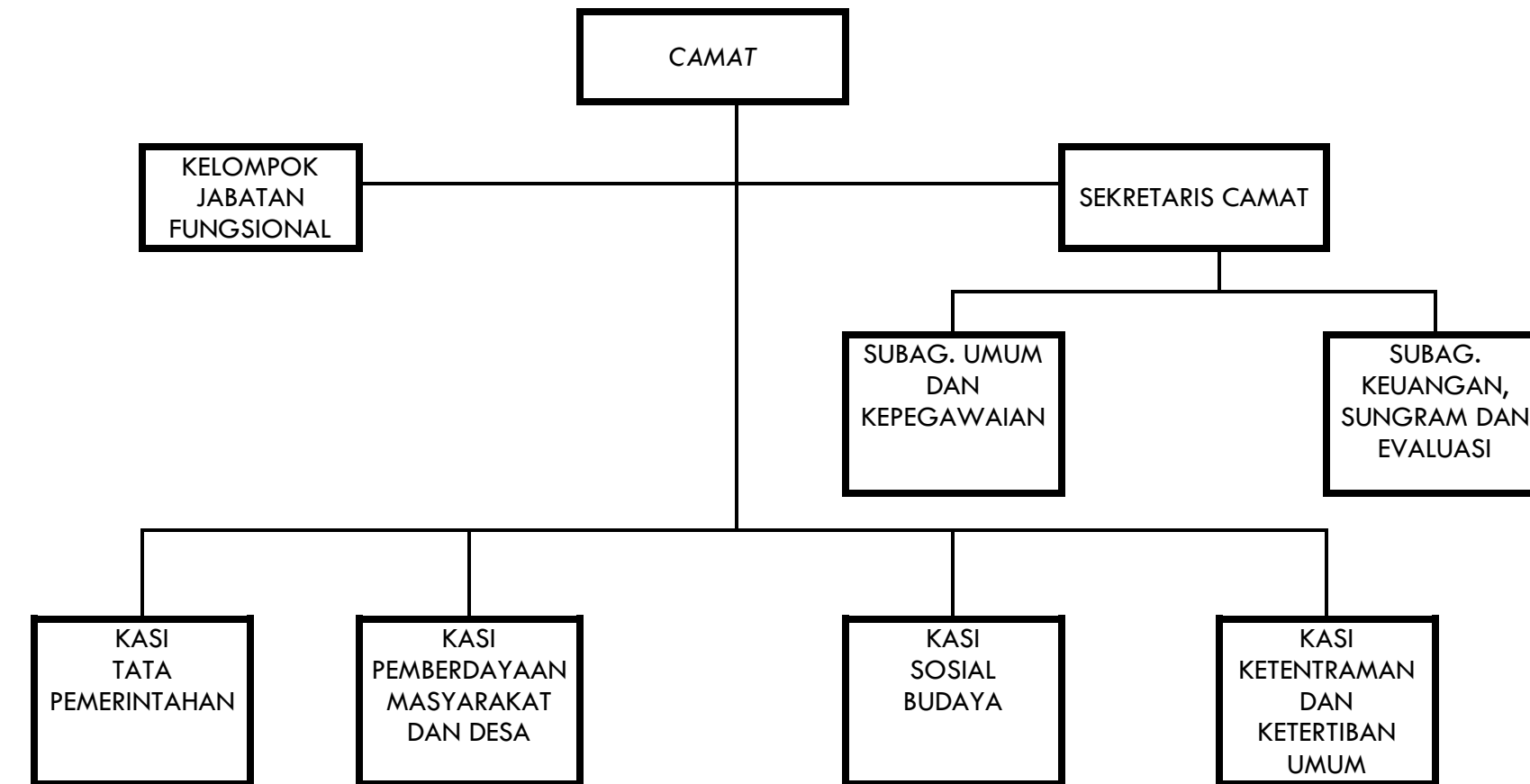
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngusikan

Kecamatan Ngusikan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Ngusikan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Kecamatan Ngusikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi Kecamatan Ngusikan terdiri dari:

- a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - e. Seksi Sosial Budaya.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Ngusikan



Sumber : Perbub 59/2018

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok yaitu tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja laporan pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan pasal 4 ayat (4) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngusikan

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat Pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kecamatan Ngusikan di tahun 2022 ditinjau dari tingkat golongan, jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2 Orang
2	Golongan III	9 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Golongan I	0 Orang
5	Honorer	6 Orang

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan/ Kepangkatan di atas dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Ngusikan yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 9 orang (42,86% dari seluruh pegawai Kantor Kecamatan Ngusikan)

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2 Orang
2	Eselon IV berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	6 Orang
3	Pelaksana	9 Orang

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan di atas dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Ngusikan yang terbanyak adalah pelaksana ,sebanyak 9 orang (61,90% dari seluruh pegawai)

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	3 Orang
2	Sarjana S1	7 Orang
3	Diploma III	0 Orang
4	SLTA	7 Orang
5	SLTP	0 Orang
6	SD	0 Orang

Sumber : Data Kecamatan Ngusikan

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari pegawai Kecamatan Ngusikan

yang terbanyak adalah berpendidikan S-I sebanyak 9 orang (42,86% dari seluruh pegawai Kantor Kecamatan Ngusikan)

Tabel 2.4

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Diklat		
		Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1.	Struktural (8 Orang)	5 Sertifikat	0	0
2.	Fungsional (0 Orang)	0	0	0
3.	Staf (9 Orang)	0	0	0

Sumber: Data DUK

Saat ini Kecamatan Ngusikan menempati gedung kantor Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang berada di Jl. Secodarmo no.5 Ngusikan. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Kecamatan Ngusikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang tersedia di Kecamatan Ngusikan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana beserta Kondisinya

No	Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	
2	Portable Generating Set	1	Baik	
3	Kendaraan Dinas R4	1	Baik	
4	Sepeda Motor	5	Baik	
5	Lemari besi	6	Baik	
6	Lemari Kayu	2	Baik	
7	Rak Kayu	2	Baik	
8	Lemari Kaca	4	Baik	
9	Papan visual /papan nama	2	Baik	
10	White Board	1	Baik	
11	Mesin Absensi	2	Baik	
12	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	
13	Kursi Kayu	2	Baik	
14	Zice	1	Baik	
15	Meja Rapat	4	Baik	
16	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	
17	Meja Resepsionis	2	Baik	

18	Meja Panjang	4	Baik	
19	Meja 1/2 Biro	2	Baik	
20	Sketsel	1	Baik	
21	Kursi Rapat	50	Baik	
22	Kursi Tamu	2	Baik	
23	Bangku Tunggu	4	Baik	
24	Kursi Lipat	20	Baik	
25	Sofa	1	Baik	
26	Meubeleur lainnya	1	Baik	
27	Jam Mekanis	1	Baik	
28	A.C. Window	0	-	
29	A.C. Split	5	Baik	
30	Kipas Angin	2	Baik	
31	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
32	Televisi	2	Baik	
33	Sound System	2	Baik	
34	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik	
35	Tiang Bendera	2	Baik	
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik	
37	Alat Pemadam/Portable	2	Baik	
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik	
40	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
42	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	Baik	
43	Camera Electronic	1	Baik	
44	Layar Film/Projector	1	Baik	
45	Alat Kedokteran umum lainnya	1	Baik	
46	Meja Kerja	1	Baik	
47	Alat keamanan lainnya (dst)	1	Baik	
48	P.C Unit	8	Baik	
49	Lap Top	7	Baik	
50	Note Book	1	Baik	
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik	
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	

53	Peralatan Komputer lainnya	1	Baik	
54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Baik	
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	Baik	
56	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	Baik	
57	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	Baik	
58	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	Baik	

Sumber: Data Kec Ngusikan

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ngusikan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngusikan Tahun 2018 s/d 2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM				77,65	83,46	N/A	N/A	N/A	85,36	85,02	N/A	N/A	N/A	109,93	101,87	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kecamatan NGUSIKAN Minimal Baik				65	65	N/A	N/A	N/A	60,05	62,16	N/A	N/A	N/A	92,38	95,63	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	22	N/A	N/A	N/A	22	21	N/A	N/A	N/A	100	95,45	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A
7	Nilai Evaluasi SAKIP				62	63,26	N/A	N/A	N/A	61,42	61,96	N/A	N/A	N/A	99,06	97,94	N/A	N/A	N/A
8	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				90	90	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	111,11	111,11	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				18	18	N/A	N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A
10	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah kendaraan				1	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A

	dinas																		
12	Jumlah pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				50	10	N/A	N/A	N/A	54	23	N/A	N/A	N/A	108	230,00	N/A	N/A	N/A
13	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukung yang dipelihara				20	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	15	100,00	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				11	10	N/A	N/A	N/A	11	5	N/A	N/A	N/A	100	50,00	N/A	N/A	N/A
15	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	1	N/A	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A	N/A	100	500,00	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				24	42	N/A	N/A	N/A	23	0	N/A	N/A	N/A	95,83	0,00	N/A	N/A	N/A
17	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah dokumen Renstra Kec. Ngusikan				0	1	N/A	N/A	N/A	0	1	N/A	N/A	N/A	0	100,00	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah dokumen Renja Kec. Ngusikan				2	1	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	200,00	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah dokumen LKJiP kec. Ngusikan				2	2	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	50	50,00	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Ngusikan				2	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	50	100,00	N/A	N/A	N/A
22	Persentase pemenuhan lahan untuk gedung kantor penunjang pelayanan administrasi perkantoran				0	100	N/A	N/A	N/A	100	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
23	Luas lahan yang tersedia				0	6000	N/A	N/A	N/A	950	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
24	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	66	73,39	N/A	N/A	N/A	60,89	61,81	N/A	N/A	N/A	92,26	84,22	N/A
25	Nilai Evaluasi SAKIP				N/A	N/A	70,01	71,60	N/A	N/A	N/A	71,75	72,06	N/A	N/A	N/A	101,11	100,08	N/A

26	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	94,12	93,26	N/A	N/A	N/A	94,12	93,26	N/A
27	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
28	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun				N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
30	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
31	<i>Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
32	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup kec Ngusikan yang di fasilitasi				N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
33	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
34	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
35	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Ngusikan</i>				N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
36	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A	0	17	N/A	N/A	N/A	0	17	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
37	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
38	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

39	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
40	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
41	Jumlah pemenuhan Barang Cetak				N/A	N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
42	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	N/A	1200	800	N/A	N/A	N/A	1200	800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
43	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
44	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
45	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
46	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
47	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	N/A	8	2	N/A	N/A	N/A	8	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
48	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
49	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
50	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum				N/A	N/A	4	3	N/A	N/A	N/A	4	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
51	<i>Jumlah penyediaan benda pos</i>				0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	<i>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
54	2. . Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				N/A	N/A	16	5	N/A	N/A	N/A	16	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

55	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD kecamatan Ngusikan yang dipelihara				N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
56	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				N/A	N/A	21	23	N/A	N/A	N/A	21	23	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
57	<u>INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</u>				N/A	N/A	7,35	7,50	N/A	N/A	N/A	7,86	5,167	N/A	N/A	N/A	106,94	0,68	N/A
58	<u>IKM Kecamatan</u>				N/A	N/A	87,00	89,50	N/A	N/A	N/A	89,17	89,37	N/A	N/A	N/A	102,49	99,85	N/A
59	<u>IPP Kecamatan</u>				N/A	N/A	3,50	3,54	N/A	N/A	N/A	3,407	0,64	N/A	N/A	N/A	97,34	18,08	N/A
60	<u>Nilai Paten Kecamatan</u>				N/A	N/A	66	71	N/A	N/A	N/A	62,16	64,65	N/A	N/A	N/A	94,18	91,06	N/A
61	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
62	1. Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
63	2. Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
64	<u>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</u>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
65	<u>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</u>				N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
66	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
67	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
68	<i>Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan</i>				N/A	N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
69	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
70	<u>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang</u>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

	<u>ditindaklanjuti instansi terkait</u>																		
71	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
72	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
73	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
74	<u>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu</u>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
75	1. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
76	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
77	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
78	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
79	<u>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</u>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
80	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
81	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

	Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif																		
82	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
83	2. . Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
84	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
85	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
86	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
87	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	N/A	N/A	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	Nilai Evaluasi SAKIP				N/A	N/A	N/A	N/A	72,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
91	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

93	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Ngusikan				N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
101	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
103	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
104	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
105	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Perundang-Undangan yang Disediakan																		
106	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
107	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
108	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
109	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
112	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114	<i>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
116	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

117	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
118	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				N/A	N/A	N/A	N/A	7,65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
119	IKM Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	IPP Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	2,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
123	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
124	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
125	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
126	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
127	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
128	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
129	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
130	<u>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</u>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

131	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
132	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
133	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
134	<u>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu</u>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
135	1. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
136	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
137	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
138	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
139	<u>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</u>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
140	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Desa yang dievaluasi																		
141	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
143	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Sebagian besar target dapat tercapai, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh faktor- faktor berikut :

- a. Adanya Peraturan daerah tentang kedudukan, susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja kecamatan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan.
- b. Adanya Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan
- c. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi;
- d. Adanya dukungan dana untuk mendukung program, kegiatan dan subkegiatan.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngusikan Tahun 208-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan NGUSIKAN	145.210.000	171.430.000	N/A	N/A	N/A	141.170.000	82.980.000	N/A	N/A	N/A	97,22	95,63	N/A	N/A	N/A	0,18	-0,41
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	46.875.000	51.585.000	N/A	N/A	N/A	46.910.000	32.015.000	N/A	N/A	N/A	100,07	95,45	N/A	N/A	N/A	0,10	-0,37
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.600.000	23.040.000	N/A	N/A	N/A	17.725.000	13.112.500	N/A	N/A	N/A	95,30	100,00	N/A	N/A	N/A	0,24	-0,26
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.305.000	51.100.000	N/A	N/A	N/A	40.380.000	27.125.000	N/A	N/A	N/A	97,76	100,00	N/A	N/A	N/A	0,24	-0,32
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	38.430.000	45.705.000	N/A	N/A	N/A	36.155.000	10.727.500	N/A	N/A	N/A	94,08	100,00	N/A	N/A	N/A	0,19	--0,70
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.833.000	238.473.000	N/A	N/A	N/A	219.322.289	194.076.955	N/A	N/A	N/A	93,00	111,11	N/A	N/A	N/A	0,01	-0,11
Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.833.000	238.473.000	N/A	N/A	N/A	219.322.289	194.076.955	N/A	N/A	N/A	93,00	100,00	N/A	N/A	N/A	0,01	-0,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.900.000	84.500.000	N/A	N/A	N/A	93.264.000	100.237.400	N/A	N/A	N/A	108,57	100,00	N/A	N/A	N/A	-0,02	0,07
Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	20.000.000		N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	0,00	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A	-1,00	0
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	39.000.000	45.000.000	N/A	N/A	N/A	60.435.000	47.277.600	N/A	N/A	N/A	154,96	230,00	N/A	N/A	N/A	0,15	-0,21

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	4.600.000	10.000.000	N/A	N/A	N/A	10.992.000	50.047.000	N/A	N/A	N/A	238,96	100,00	N/A	N/A	N/A	1,17	3,55
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	6.400.000	7.000.000	N/A	N/A	N/A	6.355.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A	99,30	50,00	N/A	N/A	N/A	0,09	-0,71
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	6.300.000	7.500.000	N/A	N/A	N/A	6.282.000	1.112.800	N/A	N/A	N/A	99,71	500,00	N/A	N/A	N/A	0,19	-0,8
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	9.600.000	15.000.000	N/A	N/A	N/A	9.200.000	-	N/A	N/A	N/A	95,83	0,00	N/A	N/A	N/A	0,56	-0,1
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	35.600.000	64.000.000	N/A	N/A	N/A	31.210.000	6.910.000	N/A	N/A	N/A	87,67	100,00	N/A	N/A	N/A	0,80	-0,79
Penyusunan rencana strategis SKPD		25.000.000	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	100,00	N/A	N/A	N/A	0	0
Penyusunan rencana kerja SKPD	15.000.000	17.000.000	N/A	N/A	N/A	14.820.000	5.375.000	N/A	N/A	N/A	98,80	200,00	N/A	N/A	N/A	0,13	-0,64
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	15.950.000	17.000.000	N/A	N/A	N/A	11.750.000	-	N/A	N/A	N/A	73,67	50,00	N/A	N/A	N/A	0,07	-1,0
Penyusunan laporan keuangan SKPD	4.650.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	4.640.000	1.535.000	N/A	N/A	N/A	99,78	100,00	N/A	N/A	N/A	0,08	-0,67
Peningkatan Fasilitas/koordinasi administrasi pemerintahan	-	2.000.000.000	N/A	N/A	N/A	1.639.132.500	-	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	0,00	N/A	N/A	N/A	0	-1,0
Pengadaan Tanah	0	2.000.000.000	N/A	N/A	N/A	1.639.132.500	-	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	0,00	N/A	N/A	N/A	0	-1,0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	3.033.088.845	2.596.912.355	N/A	N/A	N/A	2.428.170.622	2.513.570.123	N/A	N/A	N/A	80,06	96,79	N/A	-0,46	-0,51

<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	N/A	N/A	5.724.000	1.838.800	N/A	N/A	N/A	5.724.000	1.816.550	N/A	N/A	N/A	100	98,79	N/A	-0,24	-0,24
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	4.505.000	1.238.800	N/A	N/A	N/A	4.505.000	1.216.550	N/A	N/A	N/A	100	98,20	N/A	-0,22	-0,21
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	N/A	N/A	1.219.000	600.000	N/A	N/A	N/A	1.219.000	600.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,33	0,33
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	N/A	N/A	2.538.915.245	2.175.573.905	N/A	N/A	N/A	1.948.900.253	2.102.035.304	N/A	N/A	N/A	76,76	96,62	N/A	-0,46	0,52
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	2.537.739.245	2.103.375.905	N/A	N/A	N/A	1.947.724.253	2.029.837.304	N/A	N/A	N/A	76,75	96,50	N/A	-0,45	0,51
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	-	71.598.000	N/A	N/A	N/A	-	71.598.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	1,00	1,00
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	1.176.000	600.000	N/A	N/A	N/A	1.176.000	600.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,34	-0,34
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	1,00	1,00
Subkegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	1,00	1,00
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	N/A	N/A	93.766.000	24.665.050	N/A	N/A	N/A	82.818.100	24.655.725	N/A	N/A	N/A	88,32	99,96	N/A	-0,21	-0,23
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	N/A	622.000	1.531.000	N/A	N/A	N/A	622.000	1.530.125	N/A	N/A	N/A	100	99,94	N/A	0,71	0,71

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	7.282.600	12.653.550	N/A	N/A	N/A	7.282.600	12.611.200	N/A	N/A	N/A	100	99,98	N/A	0,63	0,63
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	73.080.000	0	N/A	N/A	N/A	63.592.500	0	N/A	N/A	N/A	87,02	N/A	N/A	-1,00	-1,00
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	2.550.000	3.124.500	N/A	N/A	N/A	2.550.000	3.124.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,55	0,55
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	2.352.000	2.220.000	N/A	N/A	N/A	2.352.000	2.220.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,49	-0,49
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	7.880.000	5.176.000	N/A	N/A	N/A	6.419.000	5.170.000	N/A	N/A	N/A	81,46	99,88	N/A	-0,40	-0,45
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	53.727.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	53.448.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	99,48	100	N/A	-0,21	0,72
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	53.727.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	53.448.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	99,48	100	N/A	-0,21	-0,21
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	110.808.000	89.026.000	N/A	N/A	N/A	109.426.969	85.214.801	N/A	N/A	N/A	98,75	95,72	N/A	-0,45	-0,44
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	N/A	16.020.000	22.176.000	N/A	N/A	N/A	15.987.368	19.367.629	N/A	N/A	N/A	99,80	87,34	N/A	-0,58	0,55
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	94.788.000	66.850.000	N/A	N/A	N/A	93.439.601	65.847.172	N/A	N/A	N/A	98,58	98,50	N/A	-0,41	-0,41
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	230.148.000	286.708.600	N/A	N/A	N/A	227.853.300	280.795.400	N/A	N/A	N/A	99,00	97,94	N/A	0,55	0,55
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	N/A	41.196.000	45.131.200	N/A	N/A	N/A	40.711.300	44.203.703	N/A	N/A	N/A	98,82	97,94	N/A	0,52	0,52

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	181.752.000	226.957.400	N/A	N/A	N/A	179.942.000	221.987.040	N/A	N/A	N/A	99,00	97,81	N/A	0,56	0,55
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	7.200.000	14.620.000	N/A	N/A	N/A	7.200.000	14.605.000	N/A	N/A	N/A	100	99,90	N/A	0,67	0,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,20	-0,20
<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,20	-0,20
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,20	-0,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,45	-0,45
<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,45	-0,45
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,45	-0,45
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,37	-0,37
<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,37	-0,37
Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,37	-0,37

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,08	-0,08
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,08	-0,08
Sub kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan ketahanan nasional Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	N/A	N/A	17.357.600	750.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	750.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-0,04	-0,04
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	0	750.000	N/A	N/A	N/A	0	750.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	1,00	1,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	0,69	0,69
<i>Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	0,69	0,69
Sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	0,69	0,69
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2.456.005.299	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.356.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	4.656.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.172.19 3.299	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.099.89 5.299	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	99.731.8 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	12.184.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	48.400.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.632.80 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.352.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	28.822.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sub Kegiatan : 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	2.341.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	26.162.929	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1.Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	26.162.929	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	89.233.671	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	20.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	68.733.671	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	63.327.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	38.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	9.197.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	16.080.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	5.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayannya Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.750.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	31.832.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	31.832.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	26.257.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.575.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	56.772.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	56.772.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	56.772.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum berdasarkan rasio capaian realisasi pendanaan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang tercermin dengan turunnya rasio antara realisasi dan anggaran, Adapun hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 yang diubah dalam Peraturan Bupati Jombang nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D),

Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok orang, atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.

Kecamatan Ngusikan sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ngusikan mempunyai kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

1. Segenap masyarakat yang berada di lingkup wilayah kerja Kecamatan Ngusikan.

Kelompok penerima layanan kecamatan adalah Masyarakat, dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi;

1. Pelayanan bidang perizinan
2. Pelayanan bidang non perizinan

Pedoman pelayanan kecamatan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam pasal 4 PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

2. Pemerintahan Desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Ngusikan

Desa yang merupakan kelompok sasaran layanan kecamatan, dalam hal ini kecamatan berperan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
 - b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
 - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa
 - e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
 - g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
 - i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - j. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
 - l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
 - m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
 - n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan
3. Perangkat Daerah, instansi vertikal serta instansi lintas sektoral yang ada di wilayah kerja Kecamatan Ngusikan

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan Ngusikan maka dibentuklah Forum Koordinasi kecamatan dimana di dalamnya terdiri dari Camat selaku Ketua Forkopimcam, Kapolsek dan Danramil sebagai anggotanya.

Polsek dan Koramil bersama- sama dengan Camat mempunyai hubungan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi pengambilan Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan asalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
3. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
4. Deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerinathan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Kecamatan Ngusikan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tabulasi permasalahan dan isu strategis Renstra Kecamatan
Ngusikan Tahun 2024- 2026

No	Deskripsi Permasalahan Berdasar Urusan	No	Isu Strategis
1	Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan	1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
2	Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu		
3	Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyakat yang ada di desa		
4	Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes		
5	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan		

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renacana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD.

Kecamatan Ngusikan merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Ngusikan, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama

Berdasarkan permasalahan di atas maka isu strategis yang relevan dengan Tupoksi Kecamatan Ngusikan adalah

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan

- Perlunya perbaikan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan
- Perlunya Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara layanan
- Sarana dan prasarana yang belum memadai akan menghambat pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Ngusikan.
- Terbatasnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Ngusikan daerah secara keseluruhan. Tujuan Renstra merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran Kabupaten Jombang. Yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan yang ada di kecamatan Ngusikan. Sasaran Renstra merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Ngusikan didasarkan pada :

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024- 2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, visi dan misi gubernur Jawa Timur adalah ‘ Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang parsipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong’

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026

Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005- 2025, dimana visi yang menjadi landasan adalah “Kabupaten Jombang Sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur tahun 2025” serta memperhatikan kebijakan RTRW Jombang tahun 2021-2041 dengan tujuan yang ditetapkan “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Sebagai Pusat Agribisnis dan Pengembangan Budaya Didukung Potensi Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Seni Tradisi Untuk Pemerataan Pembangunan Daerah ”.

Tema pembangunan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang adalah ‘ **Mewujudkan Jombang unggul dan dan berbudaya berbasis agribisnis**’ dengan arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 :

- a. Meningkatnya daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong

industri agribisnis dan pembangunan wilayah

- b. Penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis
- c. Mewujudkan integrasi sektor perdagangan dan industri agribisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.***

- 3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ngusikan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Berdasarkan hal diatas maka pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Ngusikan beserta indikatornya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngusikan	61,5	61,75	62,00
		1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ngusikan	73	73,25	73,5
			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	62,00	63,45	65,00
		2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Ngusikan	7,35	7,5	7,65

4.2. Cascading Kinerja PD

Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan amanah dari Undang-Undang 10 Tahun 2016, sejumlah daerah tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Untuk mengisi kekosongan (lanjutan) kepala daerah, diisi dengan Penjabat Bupati sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyusun Instruksi Mendagri 70 Tahun 2021, tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam instruksi Mendagri tersebut, Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten tahun 2024-2026

Sesuai Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Salah satu perbedaan antara RPJMD dengan RPD adalah tidak adanya visi dan misi Kepala daerah terpilih, RPD hanya memiliki tujuan dan sasaran. Sasaran dan Tujuan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Maka keselarasan antara tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi syarat wajib dalam penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka implementasi RPD Kabupaten Jombang 2024 – 2026 atau penjabaran dari tujuan dari sasaran agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka dapat digambarkan cascading kinerja Kecamatan Ngusikan sebagai berikut :

Tabel 4.2

CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024- 2026

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngusikan	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ngusikan	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
												1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

												Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
											6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
													2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
													3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											7. Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
													2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
													3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

												Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi
					2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Ngusikan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Ngusikan	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
								3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
									2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
								4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
								5. Program	Persentase	1. Fasilitas,	Jumlah Desa	1. Fasilitas	Jumlah

								Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	yang melaporkan pertanggungjawaban APBDes dengan lengkap	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
								6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
											2.Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan dalam renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas daerah. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Ngusikan mencakup penentuan kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai pedoman bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup perangkat daerah. Strategi juga merupakan cara yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Arah Kebijakan Kecamatan Ngusikan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngusikan adalah: Strategi atau langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ngusikan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
3. Mengoptimalkan kinerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan.
4. Penyesuaian kelembagaan perangkat daerah
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima.
6. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan

Kebijakan atau arah / tindakan / cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan di Kecamatan Ngusikan yaitu :

- 1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- 2. Mengembangkan / menambah kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
- 3. Merencanakan dan menyelenggarakan sistem pembangunan Kecamatan yang partisipatif
- 4. Mengembangkan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
- 5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 6. Mengembangkan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
- 7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

Rumusan sasaran, strategi,dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			
SASARAN RPD : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Menyusun Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta keuangan
		Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor dan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dan pelayanan di kecamatan Ngusikan
		Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima	Penambahan jumlah ASN serta penguatan profesionalisme dan kompetensi ASN
		Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	Bersinergi dengan instansi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

		Melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyelenggaraan monitoring ,evaluasi koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
		Memfasilitasi dan berkoordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;	Penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan kecamatan yang partisipatif dan mendukung pengembangan potensi masyarakat dan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan, sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Ngusikan guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikatornya pada perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. selanjutnya Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi:

A. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.1.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.1.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.1.9 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.5. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. **Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**
 - 2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 2.1.1 Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 3. **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
 - 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - 3.1.1 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

- 4.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 5. **Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**
 - 5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1.1 Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 6. **Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum**
 - 6.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya Rencana program dan kegiatan serta pendanaan disusun dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				INDEKS REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN	47,99	61,5	2,821,727,700	61,75	3,099,773,170	62,00	3,112,943,270	62,00	9.044.441.141		Kec. Ngusikan
	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan			1. <u>Nilai SAKIP</u>	72,06	73	2,821,727,700	73,25	3,099,773,170	73,50	3,112,943,270	73,50	9.044.441.141		Kec. Ngusikan
		7. 01. 01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	2,821,727,700	100	3,099,773,170	100	3,112,943,270	100	9.044.441.141	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	100	6,892,000	100	7,585,000	100	9,009,300	100	23.486.300.	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01. 01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	5,929,000	2	6,525,000	3	7,950,000	3	20.404.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01. 06	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realiassi kinerja yang tersusun Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	5	5	963,000	5	1,060,000	5	1,059,300	15	3.082.300	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		7. 01. 01. 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	100	2,234,804,700	100	2,568,285,170	100	2,568,456,170	100	7.471.546.041	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
				2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	100		100		100		100		Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	2,254,464,700	17	2,479,911,170	17	2,369,500,000	17	7.214.287.041	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 03	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	12	78,800,000	12	86,680,000	12	86,680,000	36	252.160.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 05	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.540,000	1	1,694,000	1	1,865,000	3	5.099.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Ngusikan	100	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000	100	39.900.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	34	13,300,000	34	13,300,000	34	13,300,000	34	39.900.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan

		7. 01. 01. 2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	86,751,000	100	95,523,000	100	97,203,100	100	279.477.100	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7 01 01 2.06 02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	24	16,600,000	24	18,260,000	24	18,260,000	72	53.120.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	48,279,000	1	53,200,000	1	53,106,900	1	154.585.900	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 05	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	7.970.000	2	8,767,000	2	9,645,000	2	26.382.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06 .06	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	1	2,442,000	1	2,690,000	1	2,686,200	1	7.818.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7 .01. 01. 2.06 .09	Sub Kegiatan : 5. Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	4	8,160,000	4	8,976,000	4	9,875,000	12	27.011.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 01	Sub Kegiatan : 6. Penyedian komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	3.300.000	6	3.630.000	6	3.630.000	18	10.560.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.07	Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	230,000,000	100	250,000,000	100	270,000,000	100	750.000.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan

		7. 01. 01. 2.07. 10	Sub Kegiatan : 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	3	230,000,000	4	250,000,000	5	270,000,000	12	750,000,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	79,809,000	100	87,860,000	100	87,789,900	100	255.458.900	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	22,209,000	24	24,500,000	24	24,429,900	72	71.138.900	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	57,600,000	25	63,360,000	25	63,360,000	75	184.320.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 01	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	88,395,800	100	77,220,000	100	77,184,800	100	224.572.800	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09. 02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	51,130,800	5	36,520,000	5	36,520,000	5	106.240.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan

			atau lapangan												
		7. 01. 01. 2.09. 09	Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	19.925.000	3	27.500.000	3	27.500.000	3	80.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09. 10	Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	23	17.340.000	23	13.200.000	23	13.164.800	69	38.332.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
				INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN	61,81	62	112.570.000	63,45	124.662.500	65	130.000.100	65	367.233.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
	2. Meningkatkan kualitas layanan publik			INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	7,2735	7,35	112.570.000	7,5	124.662.500	7,65	130.000.100	7,65	367.233.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	84,53	85,3	7,000,000	85,4	7,700,000	85,5	7,700,000	85,5	22.400.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02. 2.02	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100	100	7,000,000	100	7,700,000	100	7,700,000	100	22.400.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02. 2.02. 03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	7,000,000	12	7,700,000	12	7,700,000	36	22.400.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan

		7. 01. 05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	33,495,000	100	36,849,000	100	41,186,000	100	111.530.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 05. 2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	4	5	33,495,000	5	36,849,000	5	41,186,000	15	111.530.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
				Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4	4		4		4		12		Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7. 01. 05. 2.01 .03	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	26,840,000	100	29,524,000	100	32,480,000	300	88.844.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7. 01. 05. 2.01 .08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	6,655,000	4	7,325,000	4	8,706,000	12	22.686.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7. 01. 04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	12,075,000	100	14,613,500	100	14,615,000	100	41.303.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 04. 2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100	100	12,075,000	100	14,613,500	12	14,615,000	12	41.303.500	Kasi Trantib	Kec. Ngusikan
		7. 01. 04. 2.02. 01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	12	12	12,075,000	12	14,613,500	12	14,615,000	12	41.303.500	Kasi Trantib	Kec. Ngusikan

			Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.											
		7. 01. 06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100	15,000,000	100	16,000,000	100	17,000,000	100	48.000.000	Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 06. 2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11	11	15,000,000	11	16,000,000	11	17,000,000	11	48.000.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 06. 2.01. 03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	22	15,000,000	22	16,000,000	22	17,000,000	22	48.000.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100	100	45,000,000	100	49,500,000	100	49,500,000	100	144.000.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 03. 2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22	22	45,000,000	22	49,500,000	22	49,500,000	22	144.000.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan
				Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11	11		11		11		11		Kasi PMD	
		7. 01. 03. 2.01. 03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	4	4	30,000,000	4	33,000,000	4	33,000,000	4	96.000.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan

			di Wilayah Kecamatan												
		7 01 03 2.01 01	Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66	66	15,000,000	66	16,500,000	66	16,500,000	66	16.500.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan
Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				INDEKS REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN	47,99	61,5	2,821,727,700	61,75	3,099,773,170	62,00	3,112,943,270	62,00	9.044.441.141		Kec. Ngusikan
	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan			2. <u>Nilai SAKIP</u>	72,06	73	2,821,727,700	73,25	3,099,773,170	73,50	3,112,943,270	73,50	9.044.441.141		Kec. Ngusikan
		7. 01 01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	2,821,727,700	100	3,099,773,170	100	3,112,943,270	100	9.044.441.141	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	100	6,892,000	100	7,585,000	100	9,009,300	100	23.486.300.	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01. 0001	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	5,929,000	2	6,525,000	3	7,950,000	3	20.404.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.01. 0006	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	5	5	963,000	5	1,060,000	5	1,059,300	15	3.082.300	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		7. 01. 01. 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	100	2,234,804,700	100	2,568,285,170	100	2,568,456,170	100	7.471.546.041	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
				2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	100		100		100		100		Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 0001	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	2,254,464,700	17	2,479,911,170	17	2,369,500,000	17	7.214.287.041	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 0003	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	12	78,800,000	12	86,680,000	12	86,680,000	36	252.160.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.02. 0005	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.540,000	1	1,694,000	1	1,865,000	3	5.099.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Ngusikan	100	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000	100	39.900.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.05.000 2	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	34	13,300,000	34	13,300,000	34	13,300,000	34	39.900.000	Kasubbag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	Kec. Ngusikan

		7. 01. 01. 2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	86,751,000	100	95,523,000	100	97,203,100	100	279.477.100	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0002	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	24	16,600,000	24	18,260,000	24	18,260,000	72	53.120.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0004	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	48,279,000	1	53,200,000	1	53,106,900	1	154.585.900	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0005	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	7.970.000	2	8,767,000	2	9,645,000	2	26.382.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0006	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	2,442,000	1	2,690,000	1	2,686,200	1	7.818.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0009	Sub Kegiatan : 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	4	8,160,000	4	8,976,000	4	9,875,000	12	27.011.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.06. 0001	Sub Kegiatan : 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	3.300.000	6	3.630.000	6	3.630.000	18	10.560.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.07	Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	230,000,000	100	250,000,000	100	270,000,000	100	750.000.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.07.00 10	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	2	3	230,000,000	4	250,000,000	5	270,000,000	12	750,000,000	Kasubbag Umum dan	Kec. Ngusikan

			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan										Kepegawaian	
		7. 01. 01. 2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	79,809,000	100	87,860,000	100	87,789,900	100	255.458.900	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 0002	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	22,209,000	24	24,500,000	24	24,429,900	72	71.138.900	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 0004	Sub Kegiatan: 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	57,600,000	25	63,360,000	25	63,360,000	75	184.320.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.08. 0001	Sub Kegiatan: 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	88,395,800	100	77,220,000	100	77,184,800	100	224.572.800	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09. 0002	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	51,130,800	5	36,520,000	5	36,520,000	5	106.240.000	Sekretaris Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09.	Sub Kegiatan: 2.	Jumlah Gedung Kantor dan	3	3	19.925.000	3	27.500.000	3	27.500.000	3	80.000.000	Kasubbag	Kec.

		0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										Umum dan Kepegawaian	Ngusikan
		7. 01. 01. 2.09. 0010	Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	23	17.340.000	23	13.200.000	23	13.164.800	69	38.332.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ngusikan
				INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN	61,81	62	112.570.000	63,45	124.662.500	65	130.000.100	65	367.233.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
2. Meningkatkan kualitas layanan publik				INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	7,2735	7,35	112.570.000	7,5	124.662.500	7,65	130.000.100	7,65	367.233.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	84,53	85,3	7,000,000	85,4	7,700,000	85,5	7,700,000	85,5	22.400.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02. 2.02	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100	100	7,000,000	100	7,700,000	100	7,700,000	100	22.400.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 02. 2.02. 0003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	7,000,000	12	7,700,000	12	7,700,000	36	22.400.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	33,495,000	100	36,849,000	100	41,186,000	100	111.530.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang	100	100		100		100		100		CAMAT	Kec. Ngusikan

				ditindaklanjuti											
		7. 01. 05. 2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	4	5	33,495,000 0	5	36,849,000	5	41,186,000	15	111.530.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
				Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4	4		4		4		12		Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7 .01. 05 .2.01 .0003	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	26,840,000	100	29,524,000	100	32,480,000	300	88.844.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7 .01. 05 .2.01 .0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	6,655,000	4	7,325,000	4	8,706,000	12	22.686.000	Kasi Sosbud	Kec. Ngusikan
		7 .01. 04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	12,075,000	100	14,613,500	100	14,615,000	100	41.303.500	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7 .01 .04. 2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100	100	12,075,000	100	14,613,500	12	14,615,000	12	41.303.500	Kasi Trantib	Kec. Ngusikan
		7. 01. 04. 2.02. 0001	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara	12	12	12,075,000	12	14,613,500	12	14,615,000	12	41.303.500	Kasi Trantib	Kec. Ngusikan

			dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
		7. 01. 06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100	15,000,000	100	16,000,000	100	17,000,000	100	48.000.000	Camat	Kec. Ngusikan
		7. 01. 06. 2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11	11	15,000,000	11	16,000,000	11	17,000,000	11	48.000.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 06. 2.01. 0003	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	22	15,000,000	22	16,000,000	22	17,000,000	22	48.000.000	Kasi Tapem	Kec. Ngusikan
		7. 01. 03	Program: Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100	100	45,000,000	100	49,500,000	100	49,500,000	100	144.000.000	CAMAT	Kec. Ngusikan
		7. 01. 03. 2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22	22	45,000,000	22	49,500,000	22	49,500,000	22	144.000.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan
				Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11	11		11		11		11		Kasi PMD	
		7. 01. 03. 2.01. 0003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	4	4	30,000,000	4	33,000,000	4	33,000,000	4	96.000.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan

		7 01 03 2.01 0001	Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66	66	15,000,000	66	16,500,000	66	16,500,000	66	16.500.000	Kasi PMD	Kec. Ngusikan
--	--	-------------------------	--	---	----	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----------	------------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai se hubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD,Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LkjIP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Ngusikan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja Kecamatan Ngusikan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngusikan	72,06	73	73,25	73,50	73,50
2.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngusikan	7,2735	7,35	7,5	7,65	7,65
4.	Nilai Paten Kecamatan Ngusikan	84,53	85,3	85,4	85,6	85,6
5.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	100%	100%	100%	100%

6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Ngusikan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan rencana penyelenggaraan pemerintahan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Mojowarno disusun guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Mojowarno disusun sinergis dengan dokumen RPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD serta mendasarkan pada kebijakan-kebijakan yang berkembang selama periode 2024-2026. Dengan mendasarkan pada hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berikutnya, diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan rencana penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD maupun RPJMD.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demikian semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Ngusikan dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaannya

Ngusikan, 27 Juni 2023

CAMAT NGUSIKAN



HERU CAHYONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196808031990031011